PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA

Rosmaladewi*

Abstract: *Hasan al Banna, one of Islamic prominent figures, was born at the end of 20 tahun century. His ideas and movement together with ikhwanul Muslimin had aroused fighting spirit of Islamic society in order not be left behind. Returning to the life inspired by al-quran and as sunnah is the mission of the movement led by Hasan al Banna. Although this Islamic renewal figure had passed away, his thoughts still exist in Islamic society's life. Therefore, Hasan al-Banna's thoughts will be discussed in this article especially his political ideas.*

حسن البنا، واحدة من الشخصيات البارزة الإسلامية ، في نهاية القرن 20. قد أفكاره و الحركة جنباً إلى جنب مع " الإخوان والمسلمين " أثار الروح القتالية مي لكي لا أن تترك وراءها. وبالعودة إلى الحياة مستوحاة من آل القرآن و السنة كما هي مهمة الحركة التي يقودها حسن البنا. على الرغم من أن هذا الرقم التجديد الإسلامي قد وافته المنية، أفكاره لا تزال موجودة في الحياة المجتمع الإسلامي. لذلك، سيتم مناقشة الأفكار حسن البنا في هذه المقالة خاصة أفكاره السياسية

Kata Kunci: Hasan al-Banna, Islam dan Politik.

Sepanjang sejarah Islam, Mesir seringkali memperoleh posisi yang terpisah dari sentral kekuasaan dan selalu mendapatkan nidentitas regional. Semua itu tercermin pada kekuasaan khalifah dan masa Utsmaniyah, yaitu kedudukannya sebagai negara semi otonomi. Hal ini disebabkan pada letak geografisnya yang jauh dari pusat pemerintahan ibukota. Perasaan memiliki identitas yang terpisah inilah yang kemudian melahirkan Mesir sebagai garda depan perkembangan sosial, politik, intelektual, dan keagamaan di dunia Arab dan dunia Islam umumnya.

Mencermati kecenderungan ideologis yang berkembang di Mesir dalam wacana interaksinya dengan Barat setelah kemerdekaan, dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Tradisional Islam, yang dikawali oleh ulama konservatif dan pembela status quo;

*Koresponden penulis via email: rusmaladw@yahoo.co.id

2. Nasionalisme sekuler, yang diwakili oleh birokrat, dan tokoh-tokoh militer yang telah mengalami westernisasi;
3. Reformasi radikal Islami yang dicerminkan oleh kalangan menengah dan kelas menengah bawah yang juga telah mengalami modernisasi (Rais, 1987: 187).

Pemetaan kecenderungan tersebut merupakan penyederhanaan dan tidak mencakup seluruh peta kekuatan sosial-politik di Mesir. Tetapi paling tidak dapat menangkap arus ideologis yang muncul di Mesir pasca kolonialisme. Sejauh politik di Mesir telah terjadi evolusi pemikiran pembaharuan sejak pan-Islamisme, pan Arabisme nasionalisme lokal dan regionalisme. Dalam evolusi pembaharuan ini terlihat bahwa Islam mengalami proses periferialisme atau marginalisasi bahkan terlalu kompromistis terhadap Barat, sehingga tidak memiliki kedudukan signifikan dalam berbagai bentuk pembaharuan, khususnya di bidang politik. Sementara pada sisi yang berbeda, muncul sikap politik yang secara konsisten menunjukkan upaya untuk merekonsiliasikan Islam dengan negara. Bahkan meyakini Islam memiliki kemampuan sebagai sebuah ideologi yang total dan konprehensif, sehingga kelembagaan Islam dalam bidang sosial-politik merupakan keharusan.

Benturan dua visi politik yang berseberangan tersebut menimbulkan dinamika yang menarik tentang hubungan antara Islam dan politik, tantangannya pada negara dan dampaknya pada proses demokratisasi. Maka wajar apabila Mesir pada era 1990-an memberikan contoh tentang progresivitas politik Islam kontemporer di dunia Arab dan dunia Islam pada umumnya. Dalam hal ini adalah pengalaman Mesir mengenai Islam revolusioner radikal yang dipresentasikan dengan baik oleh kaum radikal Islam gerakan Ikhwanul Muslim (Yakan, 2002: 13-14).

Hasan al-Banna dan Pemikiran Politiknya

Untuk menjelaskan Hasan al-Banna, tidak bisa meninggalkan pemahaman sekilas sejarah Mesir yang menjadi kelahiran para tokoh pergerakan Islam, tidak terkecuali Hasan al-Banna.

Mesir adalah sebuah wilayah yang berada di benua Afrika. Peradaban Mesir begitu jauh mendahului peradaban di belahan bumi lainnya pada masa lampau. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peninggalan kuno. Terutama *manuscrip hereoglif* yang merupakan bukti sejarah tertulis yang tertua.

Mesir masuk wilayah kekuasaan Islam pada masa khalifah Umar ibn Khattab, ketika pasukan Islam di bawah pimpinan panglima Amr ibn Ash pada 649 H (al-Gharishah, t.th, 173). Muncul Mesir daulah besar yaitu daulah Umayyah dan Abbasiyyah yang dikenal dalam sejarah tersebut dengan “*the golden era*” atau dalam Stephen Humprey seperti dikutip oleh abd Mun'im Madjid sebagai *the most brilliant period* dan merupakan titik balik paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam (Madjid, 1978: 38).

Hasan al Banna lahir (1324-1368 H/1906-1049 M), lahir di sebuah desa bernama Mahmudiyah, propinsi al-Buhaira Mesir. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Syaikh Ahmad Abdurahman al-Banna, seorang penghulu, imam masjid, dan guru. Ia anak pertama dari lima bersaudara, belajar di sekolah pemerintah dan di masjid. Salah seorang guru yang berperan dalam membentuk kepribadian dan intelektualnya adalah Syaikh Mahmud Zahra.

Sekolah pemerintah yang diikutinya sampai perguruan tinggi di universitas Dar al-Ulm, tamat tahun 1927 M. Pada tahun yang sama ada dua kejadian besar pada 1932, Hasan al-Banna pindah ke Kairo, menerbitkan tabloid mingguan Ikhwanul Muslimin, kemudian an-Nazir tahun 1938; al-Syihab tahun 1947 M. Tahun 1941 terbentuk formatur untuk merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (*hai'ah ta'sisiyah*) yang pertama bagi Ikhwanul Muslimin.

Dalam sejarah pergerakannya, Kamil Syarif menulis buku *Ikhwanul Muslimin fi Harb Falisthin*, yang menerangkan rinci gerakan pasukan khusus Ikhwanul Muslimin dalam perang Palestina. Namun demikian perjuangan Ikhwanul Muslimin terus mendapat tantangan terutama pemerintah Mesir, sehingga tanggal 8 November 1948, perdana Menteri Mesir saat itu, Kamil an Naqrasyi mengumumkan pembubaran organisasi ini. Sejarah kemudian mencatat, perihal

pembubaran yang berakhir dengan pembunuhan Kamil an-Nagrasy dan klimaks dengan terbunuhnya Hasan al-Bannah pada 12 Februari 1949 M karena dendam pengikut Kamil.

Diantara karya Hassan al Banna yang kemudian menjadi aspirasi penerusnya adalah: *Ahaditsul Jum'ah* (pesan setiap jumat), *Mudzakaratu al-Dakwa wa Da'iyah* (pesan dakwa dan da'i), *al'Ma'tsurat* (wasiat-wasiat), dalam bentuk kumpulan pesan diantaranya: *Da'watuna* (misi kita) *Nahwan Nur* (menuju kecerahan). *Ila al-Syabab* (kepada para pemuda), *Baina al-Amsi wa al-yaum* (antara kemarin dan hari ini), *Risalah al-Juhad* (pesan jihad), *Risalah al-Ta'lim* (pesan-pesan pendidikan), *al-Mu'tamar al-Khamis* (konfrensi kelima) *Nizhamu al-Usar* (sistem kelompok kecil pergerakan), *al-Aqaid* (prinsip-prinsip, *al-Nidzam al-Iqtishadi* (sistem perekonomian).

Pemikiran Dasar Politik Hassan al-Banna

Hassan al-Banna disebut-sebut sebagai neo-salafie dengan pemikiran tiga pandangan dasar yaitu 1) Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri, 2) Islam memancar dari dua sumber fundamental yaitu al-Quran dan al-Hadis dan 3) Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat (Azra, 1996: 116). Untuk mengembangkan konsep itu, al-Banna memulai langkahnya dengan konsep *tarbiyah nafsiah* (pembinaan jiwa) dengan metode pendidikan qur'ani sembari bersandar juga secara kuat kepada kategorisasi al-Hadis.

Hassan al-Banna lebih mendukung status logis dari preposisi pendidikan dan sekaligus menyusun suatu perubahan moralitas Islam yang komprehensif. Karena menurutnya, sejarah panjang kehidupan manusia membuktikan betapa banyaknya generasi yang hancur akibat lemahnya pendidikan iman dan moral yang diberikan kepada anak.

Dalam pandangan Hassan al-Banna, keutamaan Islam bagi umat manusia dengan memberikan metode yang tepat dan sempurna bagi pendidikan rohani, pendidikan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan *madaniyah*. Artinya bagaimana pembentukan generasi *rabbani* masa depan mampu

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan akhlak. Pembentukan generasi *rabbani* direduksi dari teks-teks al-Quran dan al-Hadis memerlukan tanggungjawab mutlak yang satu sama lain mempunyai kaitan yang sangat erat.

Al-Banna membagi fase pembinaan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu 1) fase pengenalan seluruh lapisan masyarakat, 2) fase pembentukan kader (*marhalah al-takwin*) dari elemen pilihan yang sudah terkumpul, dibentuk regu-regu pejuang dakwa, 3) fase realisasi (*marhalah al-tanfidz*) dengan melakukan gerakan (*harakah*) dakwa bersama-sama mewujudkan hukum Allah SWT di muka bumi (Yakan, 2002: 2-3).

Dalam bukunya *majmu'atu al-Rasail*, Hassan al-Banna memandang bahwa pada saat ini kebutuhan akan tafsir yang sesuai dengan tingkat pemahaman manusia dan kekuasaan berpikir mereka (Q.S. al-Qamar: 17, al-Dukhan: 58, al-Fushilat: 53). Ia sangat menghargai tafsir *bi al-Ra'yi* (Faudah, 1987: 2-3) yang selalu memelihara agar tafsir yang dibuat tidak dipahaminya dan dikuasai oleh tujuan-tujuan khusus, kepentingan pribadi. Termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat politik (al-Banna, 1988: 8-9).

Setelah memahami nilai-nilai pendidikan iman, sosialisasi dalam kehidupan, selanjutnya memahami nilai-nilai dasar Islam dalam al-Quran dengan menafsirkan secara benar. Hassan al-Banna membuat konsep-konsep nilai pribadi dalam rumah tangga dalam tiga bagian fase tersebut. Karena menurutnya fondasi pemerintahan Islami berangkat dari fondasi keluarga. Kuatnya sebuah pemerintahan berangkat dari nilai-nilai dalam keluarga.

Pemikiran Hassan al-Banna yang berkaitan dengan politik terbagi dalam 3 (tiga) kelompok pikiran, 1) reformasi sosial dengan asas akidah, 2) tidak adanya pemisahan agama dan negara 3) syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam (Azhar, 1997: 121-124). Penjelasannya sebagai berikut:

1. Reformasi sosial dengan asas akidah

Al-Banna menyakini benar bahwa sesungguhnya perubahan sosial dan perbaikannya harus dimulai dengan apa yang terdapat dalam diri. Dengan argumentasi surat al-Ra'ad: 11 konsep ini menawarkan satu model perubahan sosial dengan fase yang disebutkan di atas bahwa perubahan pada fase awal terpusat dari pribadi. Selanjutnya perubahan pada keluarga; dan selanjutnya menuju kepada masyarakat secara *kaffah*. Perubahan dengan asas akidah ternyata memberikan implikasi yang luas, setidaknya dalam mempertahankan keimanan dan akhlak dalam kondisi negara dalam perubahan apapun. Asas ini ternyata dibuktikan dengan ketahanan Mesir dalam menghadapi modernisasi Barat pada masa hidupnya.

2. Tidak adanya pemisahan agama dan negara

Bagi Hassan al-Banna, agama tidak dapat berpisah dengan agama. *Umara* sebagai pelaku utama dalam pemerintahan wajib berkolaborasi dengan ulama. Kuatnya suatu pemerintahan apabila peran ulama diposisikan pada kedudukan yang sesuai. Ulama menjadi tempat untuk mempertimbangkan semua kebijakan yang berkenaan dengan kemaslahatan umat Islam. Kehancuran sebuah pemerintahan menurutnya, karena ulama dimarjinalkan dalam posisi lemah dan hanya sebagai tameng sebuah keputusan.

3. Syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam

Islam sebagai agama paripurna, mempunyai tataran nilai hukum yang wajib diikuti semua umat Islam. Oleh karena kedudukan syariat Islam sebagai *dustur al-a'la* dalam pemerintahan Islam mutlak.

Ide-ide cemerlang menjadi wacana dasar Ikhwanul Muslimin, dan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dilakukan melalui ceramah rutin, menerbitkan majalah dan brosur atas eksistensi Islam dan pembaharuan, dan secara bertahap melakukan rekonstruksi organisasi tersebut. Oleh karenanya untuk sebagian analisis al-Husaini dan Yakan menilai bahwa gerakan awal al-Banna dan Ikhwanul Muslimin mulai membangkitkan kesadaran beragama bangsa Mesir saat itu; kesadaran kembali pada ajaran murni Islam; dan

menumbuhkan spirit juang untuk satu pembebasan terutama dari ekspansi kerajaan Inggris.

Hassan al-Banna: Persamaan Hak Penuh

Dalam berbagai tulisan Hassan al-Banna, dapat ditarik pandangan yang jelas tentang persamaan hak antara kaum muslimin dan non muslimin. Tokoh kharismatis pendiri Ikhwanul Muslimun membahasnya dalam tulisan *Nahwan Nuur* (menuju cahaya) yang pada dasarnya ditujukan pada penguasa dan pejabat tinggi Mesir selama kurang lebih setengah abad. Karya itu berjudul *Al-Islam Yahmiil Aqalliyyaati wa Yashuunu Huqunqal Ajaanib* (Islam menjaga kelompok minoritas dan memelihara hak-hak orang lain). Dalam bukun itu dinyatakan Islam menyucikan persatuan manusia secara universal. Kemudian mensucikan persatuan agama secara universal pula ketika terjadi fanatisme. Islam mengharuskan para pemeluknya untuk mengimani seluruh agama samawi. Kemudian Hassan al-Banna menegaskan, inilah yang Islam yang dibangun di atas sikap moderat dan kesadaran tinggi, tidak mungkin diikuti oleh pemecah belah persatuan yang terpadu ini. Namun sebaliknya, kesucian agama yang mampu mempersatukan manusia ini terkadang dijadikan alat legitimasi kepentingan tertentu (al-Banna, 1988: 207).

Dalam tulisannya yang bertajuk *Musykilaatunaa fi Dhau'in-Nizhaam I-Islami* (problematika kita dalam perspektif sistem Islam), Hassan al-Banna menyatakan dengan jelas “minoritas nonmuslim yang menjadi warga negara ini diajari kesempurnaan ilmu tentang bagaimana mencapai ketenangan hidup, keamanan, keadilan, dan persamaan hak secara penuh dalam menjalankan seluruh ajaran agamanya. Dengan nada menyatukan, Hassan al-Banna menambahkan, sejarah panjang yang membenteng hubungan baik dan mulia antara warga negara muslim dan nonmuslim, cukuplah bagi kita sebagai bekal. Kita perlu mencatat prestasi para warga negara yang mulai itu karena mereka menjunjung tinggi makna-makna ini pada setiap kesempatan, menjadikan Islam sebagai makna nasionalismenya, meskipun hukum-hukum dan ajaran-

ajarannya tidak berasal dari akidah mereka (akidah non Islam) (al-Banna, 1988: 236).

Dalam rumusannya mengenai prinsip-prinsip dasar sistem sosial Islami sebagaimana dipedomani al-Ikhwan al-Muslimun, Hassan al-Banna menawarkan sebelas prinsip dalam tulisannya *Bainal-Amsi wal-Yaum* (antara kemarin dan hari ini). Salah satu prinsip tersebut adalah mengumandangkan persaudaraan antara manusia, kebangkitan antara pria dan wanita secara bersama solidaritas dan persamaan hak antara pria dan wanita. Serta merumuskan tugas masing-masing secara terinci dan mendetail (al-Banna, 1988: 228).

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini adalah bahwa tawaran Hassan al-Banna tersebut lahir sebagai respon terhadap kondisi umum di Mesir saat itu. Pemimpin umat ini berusaha keras merumuskan instrumen-instrumen untuk melepaskan diri dari kondisi sulit tersebut. Itulah sebabnya, ia menamakan prinsip-prinsip tersebut *al-Munjiyaatul-Asyr* (sepuluh hal yang menyelamatkan). Beberapa prinsip tersebut dapat penulis sebutkan, misalnya: persatuan, kebebasan, menjalankan syariat Islam, dan menegakkan hukum-hukum pidana masing-masing pada urutan pertama, kedua, keenam, dan kedelapan.

Konsep yang diajukan al-Ikhwan al-Muslimun ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh banyak organisasi sesudahnya mengalami dinamika aktualisasinya dari waktu ke waktu di bawah panduan sang Mursyid (Hassan al-Banna). Organisasi dakwa ini berupaya memperjela dinamika perjalannya secara terperinci melalui dialog terbatas antara Hassan al-Banna dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Di bawah ini akan dipaparkan esensi dialog tersebut.

Pertama, Hassan al-Banna sejak semula telah berusaha keras menarik kekuatan orang-orang Qibthi Mesir ke dalam barisannya. Keinginannya untuk bekerjasama dengan mereka didasarkan atas persepsi bahwa masing-masing golongan merupakan bagian dari umat dan mempunyai hak untuk dihormati dan dicintai. Muhammad Hamid Abu Naser menceritakan bahwa Hassan al-Banna pernah memintanya

untuk mengumumkan kepada warga Ashiuth salah satu wilayah utama Qibthi Mesir, bahwa tujuan dakwa Hassan al-Banna adalah membangun masyarakat beragama. Masyarakat diarahkan untuk berpegang teguh pada agama, termasuk orang-orang kristen. Keagungan dakwa inilah yang mendorong Mathran Qana pejabat sesudah Muhammad Hamid Abu Naser untuk mendukung Hassan al-Banna dan misi dakwanya secara terbuka.

Kedua, menjalin ikatan dengan orang yang mempunyai hubungan personal dengan simbol-simbol Qibthiyah. Bahkan Hassan al-Banna pernah mengundang salah seorang rekannya, Luis Fanus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat wilayah Abnub, untuk berbincang-bincang bersamanya dan jamaah al-Ikhwan al-Muslimun dalam forum mingguan hari Selasa, Fanus sering menyertai Hassan al-Banna dalam perjalanan mengunjungi kota-kota di Mesir.

Ketiga, Hassan al-Banna berkerjasama dengan Luis Fanus dan tokoh-tokoh Qibthi lainnya seperti Wahid Dous dan Karim Tsabit dalam organisasi politik dari seksi penyuluh anggota.

Keempat, ketika pemerintahan Husain Siri Pasyah pindah dari Kairo ke Qana pada waktu itu Hassan al-Banna masih menjadi guru, maka orang yang segera meminta tanggapan dalam parlemen mengenai sebab-sebab perpindahan tersebut adalah Taufiq Dous Pasya, seorang Qibthi Mesir. Selain Iqhtil (yang ikut mengantarkan jenazah Hassan al-Banna ke pemakaman), Hassan al-Banna juga menjalin hubungan dengan seorang Qibthi lainnya, Makram Abid Pasya.

Kelima, sebagian orang Qibthi ikut memberikan sumbangan kepada jamaah al-Ikhwan Muslimun dalam rangka membeli wilayah baru untuk para jamaah di Halabiyah Jadidah (Halabi Baru). Setelah pindah, al-Ikwan al-Muslimun menerbitkan buku kecil tang mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi orang-orang Qibthi.

Keenam, Hassan al-Banna mengatakan bahwa sebagian tokoh Qibthi mengajukan diri kepadanya untuk bergabung bersama al-Ikhwan al-Muslimun, karena menurut mereka organisasi ini merupakan “saudara orang-orang Mesir” salah

seorang tokoh Qibthi juga pernah menghadiri seminar yang digelar oleh al-Ikhwan al-Muslimun di Thantha.

Ketujuh, Ahmad Adil Kamal, penuli buku *an-Nuqath Fauqa-Huruf* (titik di atas huruf) menjelaskan bahwa ketika Hassan al-Banna mencalonkan dirinya dalam pemilihan parlemen di Mesir (1944) dari daerah Ismailiyah, maka yang menjadi wakilnya di Kota Thur di tepi Sinai adalah orang kristen Yunani yang nama dimesirkan menjadi Ulu Kharisto. Ahmad Adil mengatakan bahwa sikap Hassan al-Banna itu dimabil berdasarkan pertimbangan praktis. Ketika Hassan al-Banna berhadapan dengan kekuatan politik kelompok sekuler, mereka berusaha menjadikannya terbaratkan dan menolak keberadaannya.

Setelah wafatnya Hassan al-Banna, terjadilah kesenjangan ijthad di tubuh al-Ikhwan al-Muslimun. Kelompok ini terbagi atas pihak yang pro dan kontra dengan jalan (metoda) yang lama. Dua kecenderungan tersebut dapat dicermati pada pemikiran beberapa tokoh al-Ikhwan al-Muslimun yang mewakili dua kecenderungan yang berbeda ini.

Pertama, buku Syek Muhammad al-Ghazali, *At-Ta'ashshub wat-Tasamuh bainal-Masihyyah wal-Islam* (fanatisme dan toleransi di antara Kristen dan Islam) Cetakan Darul Kutub al-Hadistsah, Kairo cetakan ke-3, 1965, dan buku Syek Yusuf Qardhawi, *Ghairul-Musliminn fil-Mujtama'il Islaami* (yang bukan kaum Muslimin dalam masyarakat Islam) cetakan Maktabah Wahbah, Kairo cetakan ke-1, 1977. Kedua buku ini mempresentasikan kontinuitas garis pemikiran Hassan al-Banna mengenai kedudukan kaum muslimin.

Kedua pemikiran yang menyimpang dari jalan pertama yang diwakili oleh Sayyid Quthub dengan bukunya *Fizdilal il-Qur'an* (di bawah lindungan al-Qur'an) terbutan Darus Syuruq, Beirut, cetakan ke-10, tanpa tahun dan Syek Sa'id Hawwa dengan bukunya *Al-Madkhal ila Da'watil-Ikhwan il-Muslimun* (pintu masuk dakwah al-Ikhwan al-Muslimun) tanpa penerbit. Buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati 50 (lima puluh) tahun al-Ikhwan al-Muslimun.

Sikap Hassan al-Banna Terhadap Peradaban Barat

Ide-ide dasar dalam tulisan ini dikutip dari terjemahan asli Jabir Rizq, *al-Imam al-Syahid Hassan al-Banna bi Aqlami Talamidzhi wa Mua'asirih* Kairo: Dar al-Wafa, 1985. Peradaban Barat tidak mendapat tempat bahkan tidak dapat kompromi dalam pemikiran Hassan al-Banna, menurutnya barat yang mempunyai tingkat kemajuan dalam ilmu dan teknologi sesungguhnya mempunyai dasar yang kropos. Ketinggian ilmu dan teknologi yang dimiliki hanyalah sebagai "bom waktu" sebuah kehancuran dalam dirinya sendiri penemuan-penemuan ilmiah, dan sistem barat yang materialis murni tidak memberikan kesejukan dan ketentraman bagi pemiliknya. Menurut Islam telah memberikan peradaban sempurna, nilai-nilai tatanan yang terkandung jauh lebih sempurna dari peradaban Barat.

Semua hasil peradaban Barat telah tercakup dalam sistem Islam, maka, menurutnya tidak perlu takjub dengan hasil produk peradaban barat. Konsistensi Hassan al-Banna dibuktikan dengan tetap tegak pada sikapnya saat para ulama lain mulai membuka diri dengan tetap memperjuangkan wacananya "peradaban barat yang materialistis bertentangan dengan nilai-nilai rohani dan akhlak dalam Islam".

Konsep "Wathaniah" Hassan al-Banna

Al-Banna sangat menentang konsep pemetaan kebangsaan dalam negara. Pembentukan polarisasi dalam sebuah negara akan munculnya "*ashabiyah*" fanatisme negara, suku, dan golongan. Kehancuran sebuah bangsa disebabkan nilai-nilai varian berbangsa dijadikan dasar utama dalam melaksanakan tata nilai bernegara. Oleh karena itu, konsep *wathoniah* yang maksudnya adalah kelompok masyarakat yang menetapkan persaudaraan, gotong royong disiplin dan bertemunya dengan kelompok lain merupakan kesatuan. Memelihara tanah bersama merupakan bukti *Hablu al-Wathan*.

Dengan demikian, pendirian negara untuk berkuasa dan menguasai dan memperluas untuk tujuan satu kelompok masyarakat merupakan sebuah kediktatoran, mempersempit hak-hak orang lain, menggerogoti kemerdekaan bangsa lain

usaha bangsa yang demikian tidak ada lain kecuali “jihad” mempertahankan kehormatan hak.

Gambaran *Wathaniah* yang dikehendaki al-Banna adalah sebagaimana ungkapannya. “Setiap jengkal tanah di atas bumi yang ada di dalamnya ada saudara kita yang beragama Islam maka ia adalah bagian dari tanah Islam yang dengannya setiap putra Islam wajib berbuat demi menjaga dan menguburkannya. Batasan *Wahan* adalah akidah dan bukan dengan batasan tanah secara geografis, setiap dataran yang ada muslimnya maka ia adalah *Wathan* kita yang memiliki kesucian, kecintaan, keikhlasan untuknya dan jihad demi kebbaikannya (Gharizhah 1992: 31-32).

Konsep Khalifah Islamiyah Hassan al-Banna

Hassan al-Banna menilai bahwa khalifah merupakan rukun atas berlangsungnya pemerintahan Islam. Ia menandakan bahwa langkah-langkah menuju khalifah Islamiyah wajib dilaksanakan dengan menguatkan barisan keluarga. Sehingga kemampuan umat Islam benar-benar tangguh dalam membentuk khalifah Islamiyah. Imam tidak mutlak dari Ikhwanul Muslimin, siapapun bila memang mampu dapat menjadi Imam, dan ikhwanul muslimin sebagai garda depan melindungi. Dalam kaitan ini. Al-Banna mengajak untuk menghindari jauh-jauh dari partai-partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya yang mengakibatkan perpecahan. Ia sangat menolak multi partai dalam sebuah pemerintahan (al-Banna, 1988: 8-9).

Konsep Jihad Hassan al-Banna

Dalam salah satu bukunya *Risalah al-Jihad* yang dikutip Muhammad Ali Gharizhah (1992: 67), Hassan al-Banna menulis “Islam adalah ibadah dan kepemimpinan, agama, dan negara, rohani dan jasmani, shalat dan jihad, ketaatan dan pemerintahan, *mushaf* dan pedang tidak dapat dipisahkan antara satu dari yang lain (Gharizhah 1992: 31-32). Dari kata-kata ini Hassan al-Banna menjadikan jihad adalah rukun yang asasi bagi gerakan Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya gerakan adalah satu bentuk kerja dan perjuangan bukan

sekedar filsafat ataupun pemikiran. Jihad adalah kewajiban agama yang sama sekali tidak lebih kecil artinya dibanding kewajiban-kewajiban lain, bahkan ia adalah metoda dasar dalam dakwah demi mencapai tujuan yang meliputi seluruh sisi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.

Kesimpulan

Sesungguhnya tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri sendiri (al-Ra'ad: 11). Konsep al-Qur'an ini menjadi pegangan gerakan Hassan al-Banna. Dalam pemikirannya ia memberikan metoda gerakan yaitu dalam bentuk pembinaan, pengembangan, dan penyebaran. Terlepas dari kontradiksi dalam pemikirannya terutama dalam memahami nilai-nilai Islam substansi, Hassan al-Banna adalah *mujaddid* yang menjadi bagian *khazanah* intelektual muslim yang terus dikaji pemikirannya.

Daftar Pustaka

- Al-Banna, Hassan, 1988. *Panggilan al-Qur'an*, (Terj), Pustaka, Bandung
- , 1988. *Majmu'atur-Rasaail*, Mu'assasat, Beirut, al-Risalah,
- , 1988. *Muzakkiraatud Da'wah wad-Da'iyah*, Mu'assasatur Risalah, Beirut.
- Al-Gharishah, Muhammad, 1992. *Lima Dasar Gerakan al-Ikhwah*, (terj), Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Hamawi, Yaqut, 1992. *Mu'jam al-Buldan*, Jilid, V, Dar al-Fikr, Beirut.
- Azhar, Muhammad, 1997. *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, RajGrafindo Persada, Jakarta.
- Azra, Azyumardi, 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Paramadina, Jakarta.
- Faudah, Muhammad Basuni, 1987. *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an, Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, Pustaka, Bandung.
- Husaini, Ashak Musa, 1983. *al-Ikhwahul Muslimin: Tinjauan Sejarah Sebuah Gerakan Islam (Bawah Tanah)*, Grafiti Press, Jakarta.
- Junaidi, Heri, 2009. *Narasi Nilai Pemikiran Hassan al-Banna dalam Pandangan Ideologi Sekuler Mesir*, Makalah disampaikan pada Orientasi Pemikiran Islam (OPI) Lembaga Pemerhati Sosial Keagamaan elpikra, Jakarta.
- Laeguer, W, 1972. *a History of Zionism*, Oxford, New York University.
- Madjid, Abdul Mun'in, 1987. *Tarikh al-Hadharah al-Islamiyah fi al-Ushur al-Wustha*, Maktabah al-Ilmi al-Mishriyah, Kairo.
- Rizq, Jabir, 1985. *al-Imam al-Syahid Hassan al-Banna bi Aqlami Talamidzin wa Mua'asirih*, Dar al-Wafa, Kairo.
- Yakan, Fathi, 2002. *Gerakan Ikhwanul Muslimin: Dari Sayyid Quthb Sampai Rasyid al-Ghanussyi*, Harakah, Jakarta.
- , 2002. *Revolusi Hassan al-Banna*, Harakah, Jakarta.